

Juridical analysis of legal impediments and disputes arising from the implementation of unconditional principle to surety bond disbursement process in goods and services procurement project financed by state revenue and expenditure budget = Analisis yuridis terhadap hambatan dan sengketa hukum yang ditimbulkan dari penerapan 'Unconditional Principle' terhadap proses pencairan 'Surety Bond' dalam proyek pengadaan barang dan jasa yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Muhammad Govino Abdiella Dayanu, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20514584&lokasi=lokal>

---

Abstrak

Proyek pengadaan barang dan jasa Pemerintah memiliki skala kompleksitas yang signifikan, mencakup risiko akan kinerja Kontraktor dalam memenuhi kewajiban kontrak terhadap Pemerintah. Alhasil, Pemerintah mewajibkan suatu jaminan untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan oleh Kontraktor, yang salah satunya adalah Surety Bond. Skripsi ini membahas prinsip tanpa syarat dalam surety bond dengan penelitian untuk menganalisa: (1) akibat dan isu hukum yang timbul dari penerapan asas tanpa (2) bukti yang diperlukan dan beban pembuktian dalam proses klaim pencairan dan sengketa hukum yang timbul dari itu, dan untuk memperdalam telaah, Skripsi ini membahas Putusan Mahkamah Agung Nomor 618K/Pdt/2019 untuk menggarisbawahi persoalan hukum isu hukum yang bersangkutan. Skripsi ini merupakan penelitian deskriptif yang menerapkan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman prinsip tanpa syarat mengakibatkan pencairan surety bond terlepas dari situasi kerugian dan kewajiban untuk menandatangani perjanjian ganti rugi. Masalah hukum yang timbul berkaitan dengan kerentanan terhadap moral hazard dan kerugian terhadap posisi keuangan Principal. Keadaan merugikan Principal kian diperparah karena sifat sepihak dari bukti yang diperlukan dan beban pembuktian untuk klaim pencairan surety bond. Skripsi ini menyarankan penerapan prudential inspection dalam proses underwriting surety bond dan untuk merubah bukti-bukti yang diperlukan untuk klaim pencairan. ....scale of complexity, encompassing risks on the performance of the Contractor in fulfilling its contractual obligations beholden to the Government. Accordingly, the Government requires a form of guarantee to assure the performance of procurement work by the Contractor, one of which is Surety Bond. This thesis discusses the principle of unconditionality in surety bond with research objectives to analyze: (1) the legal consequences and impediments arising from the application of unconditional principle, (2) the required evidence and burden of proof in the process of claiming disbursement and the legal disputes arising thereof and to further provide insight, this thesis avails in the vivisection of Putusan Mahkamah Agung Nomor 618 K/Pdt/2019 to underline the relevant legal issues. This thesis is a descriptive research implementing normative juridical methods. The results exhibit that the inclusion of unconditional principle results in the immediate disbursement of surety bond regardless of situation of loss and the subsequent obligation to sign indemnity agreement. The ensuing legal issues concern with the susceptibility to moral hazard and the principal's detrimental financial position. The detrimental position of the principal is further aggravated due to the unilateral nature of required evidence and burden of proof to claim surety bond disbursement. This thesis suggests the implementation of prudential inspection in the process of underwriting surety bond and to

amend the required evidence to claim for disbursement.